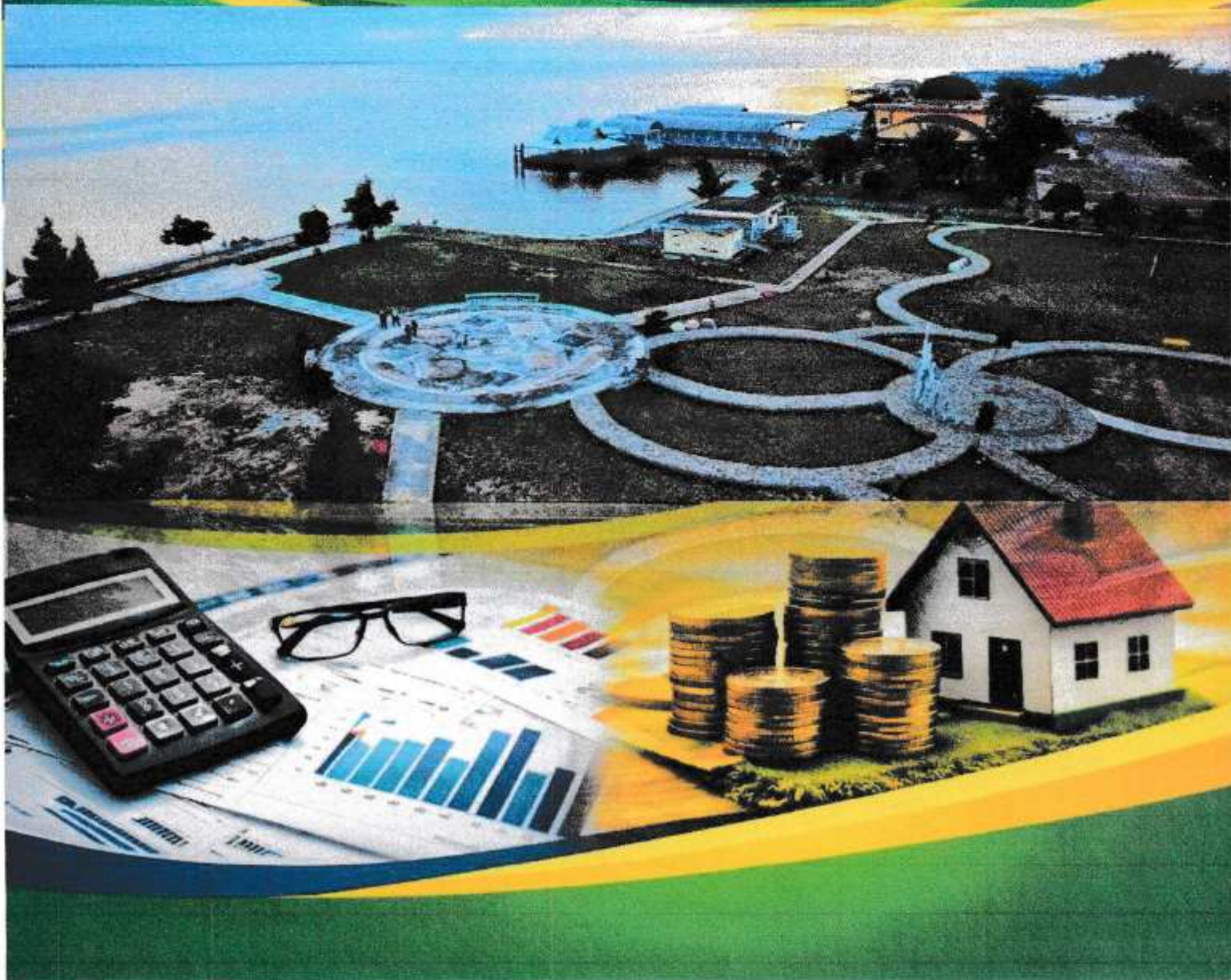




LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi ***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"***. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yaitu menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu ***"Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian"***. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja ini di susun sebagai bahan yang dievaluasi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis,

H. Aready
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	2
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	17
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
E. Analisis Program/Kegiatan	18
 BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

BAB I

BAB II

Tabel 2.1	Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2	Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Prototype)	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	10
BAB III		
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja	11
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	12
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	12
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	14
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	16
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	16
Tabel 3.7	Capaian Kinerja dan Anggaran TA 2025	17
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapainya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat;**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. **Bidang Anggaran;**
 - a. Sub Bidang Anggaran I
 - b. Sub Bidang Anggaran II

4. Bidang Perbendaharaan;

- a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
- b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah

5. Bidang Akuntansi;

- a. Sub Bidang Akuntansi I
- b. Sub Bidang Akuntansi II

6. Bidang Aset;

- a. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
- b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset
- c. Pelaksana tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- e. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta kepegawaian dan umum, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan noram, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

Bidang anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
- c. Pengendalian penyusunan anggaran dan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan anggaran, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh kelompok JF.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas & kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

- d. Pengelolaan utang piutang daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Perbendaharaan, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh kelompok JF.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait akuntansi dan konsolidasi, analisa data dan pelaporan, pembinaan akuntansi dan pelaporan konsolidasian kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur akuntansi dan konsolidasi, analisa data dan pelaporan, serta pembinaan akuntansi dan pelaporan untuk konsolidasian kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh kelompok JF.

6. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik daerah;

- c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
- d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik Daerah
- e. Penyelenggaraan fungsi lain diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Aset, Kepala Bidang Aset dibantu oleh kelompok JF.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kelompok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dibuat oleh perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pimpinan Kab. Bengkalis. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai landasan untuk menyusun rencana kerja (Renja) tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu ***"Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif"***

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni **"Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah dan Optimalisasi Penataan Aset"**

1. Meningkatnya Penatausahaan asset Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase Penatausahaan asset yang tertib dan terukur
 - ✓ Persentase pemanfaatan kekayaan aset daerah yang menunjang peningkatan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Ketepatan waktu Penyusunan APBD
3. Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu yang tepat waktu, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase bendahara pengeluaran dan pembantu yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban.
4. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah, dengan indikator sasaran adalah:

- ✓ Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1
Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2022	2023	2024	2025	2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Optimalisasi Penataan Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur	45%	50%	55%	60%	65%	70%
	Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD	35%	40%	45%	50%	55%	75%
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Terwujudnya Penyampaian Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Yang Tepat Waktu	Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban	85%	86%	87%	88%	89%	90%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Disamping sasaran indikator kinerja diatas pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan sasaran kinerja, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	B
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77
4	Terwujudnya pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	85%
		Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP pada Kopsurgah KPK	85%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja menciptakan komitmen tertulis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik, menjadi dasar evaluasi SAKIP.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	B
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77
4	Terwujudnya pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	85%
		Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP pada Kopsurgah KPK	85%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Berdasarkan tabel sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa fokus utama perangkat daerah adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini tercermin dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi, serta penerapan manajemen risiko secara sistematis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	B	Belum Ada Hasil Penilaian Dari Pihak Terkait	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	75,55	98.11%
4	Terwujudnya pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%	68.27%	68.27%
		Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	85%	55.9%	65.76%
		Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP pada Kopsurgah KPK	85%	43.4%	51.05%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (Lima) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator tersebut Dua Indikator dinyatakan "berhasil" dengan capaian 100%, sedangkan Satu indikator belum mendapatkan hasil dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah .

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah”

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Capaian Tahun 2021 terhadap Tahun 2025
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Pengelolaan Aset	-	B	-	-	-
Rata-rata capaian					

1. Indeks Pengelolaan Aset

Untuk Nilai Indeks Pengelolaan Aset Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Belum Mengeluarkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset untuk Kabupaten Bengkalis, sehingga Target Indeks Pengelolaan Aset yang telah ditetapkan belum dapat hasilnya.

Sasaran 2

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator	Capaian 2024	Tahun 2025			Capaian Tahun 2021 Terhadap Tahun 2025
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	100%	B
Rata-rata capaian					100%

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 telah berhasil mendapat predikat B. hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 tanggal 12 Desember 2024. Dimana Kabupaten Bengkalis mendapatkan indeks total 64,164 dengan predikat nilai B. Untuk Penilaian Tahun 2024 Belum Dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Gambar 3.3
Skor Capaian Sasaran 2



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
- Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD Baik untuk fungsi pendidikan, urusan kesehatan dan belanja infrastruktur yang sesuai Perundang-undangan.
- Kabupaten Bengkalis Telah Meraih OPINI BPK terhadap LKPD Selama 10 Tahun berturut-turut

Potensi Hambatan

- Transparansi Keuangan Daerah yang publikasinya tidak tepat waktu pengungkapannya.

Strategi Pemecahan

- Transparansi Keuangan Daerah yang ketepatan waktu pengungkapannya dan mudah di akses.

Sasaran 3:

"Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik"

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja evaluasi internal dan capaian kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja 98.12% dari target Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 77 telah terealisasi dengan Nilai 75.55. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025			Capaian 2021 Terhadap 2025
	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	77	75.55	98.12%	100%
Rata-Rata Capaian						98.12%	99.53%

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/167/ITDA tanggal 22 Agustus 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mendapat nilai 75.55 dengan kategori **BB** interpersi **Sangat Baik** dengan rincian nilai perencanaan kinerja 24.60, Pengukuran Kinerja 21.60 Pelaporan Kinerja 11.85 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 17.50.

Gambar 3.8
Skor Capaian Sasaran 5



Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Komitmen pimpinan dan organisasi
- Perencanaan kinerja yang jelas
- Peran APIP dalam pengawasan
- Dukungan anggaran dan SDM

- e. Kesadaran regulasi dan pedoman resmi

Potensi Hambatan

- a. Lemahnya pemahaman regulasi
- b. Keterbatasan SDM dan kapasitas
- c. kondisi geografis dan infrastruktur terbatas

Strategi Pemecahan

- a. Memperkuat komitmen pimpinan dan budaya akuntabilitas.
- b. Memberikan pengetahuan teknis bagi aparatur terkait penyusunan IKU/IKK.
- c. Mengoptimalkan peran APIP sebagai pengawas dan pendamping
- d. Menyediakan anggaran yang memadai serta memperbaiki infrastruktur pendukung.

4. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah adalah ukuran seberapa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di suatu perangkat daerah ikut serta dalam survei yang bertujuan menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kerja mereka. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KPK melalui link <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/> Persentase Partisipasi ASN dalam SPI Internal Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dari dengan capaian 68.27%.

MCSP KPK adalah **Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention**, sebuah sistem pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi tata kelola pemerintahan daerah agar bersih dan transparan, menggantikan sistem sebelumnya (MCP) dengan cakupan yang lebih luas dan lebih efektif untuk mencegah korupsi sejak dini.

Pada Tahun 2025 berdasarkan hasil dari penilaian oleh MCSP KPK Bersama Kemendagri, BPKP dan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait area Pengelolaan BMD 8% dengan bobot 0.08 dengan capaian 49.4 dengan kontribusi terhadap capaian MCSP Per Area 3.952. sedangkan area penganggaran daerah pada MCP Kopsurgah KPK 15 % dengan bobot 0.15 capaiannya 43.3 kontribusi terhadap capaian MSCP Per area 6.51. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Capaian 2021 Terhadap 2025
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah		100%	68.27%	68.27%	68.27%
Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK		85%	55.9%	65.76%	65.76%
Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK		85%	43.40%	51.05%	51.05%
Rata-Rata Capaian				59.12	59.12

5. Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah

Pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, serta memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, program, maupun kegiatan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap potensi hambatan atau ancaman dapat dikendalikan sehingga perangkat daerah tetap mampu mencapai sasaran pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator Peta risiko Perangkat Dearah tahun 2025 dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Capaian 2021 Terhadap 2025
		Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah peta risiko perangkat daerah	1 Dokumen	1	1	100%	100%
Rata-Rata Capaian				100%	100%

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Kepala daerah dan pimpinan OPD yang serius terhadap penerapan manajemen risiko akan mendorong konsistensi.
- b. **Ketersediaan Regulasi dan Pedoman**
- c. SDM kompeten
- d. Ketersediaan data dan informasi
- e. Budaya akuntabilitas dan transparansi

Potensi Hambatan

- a. Kurangnya pemahaman konsep risiko
- b. Keterbatasan SDM dan kapasitas teknis
- c. Kondisi geografis dan infrastruktur terbatas

Strategi Pemecahan

- a. Memperkuat komitmen pimpinan dan budaya akuntabilitas.
- b. Memastikan **data yang valid** sebagai dasar analisis.
- c. Meningkatkan **koordinasi antar-OPD** agar risiko lintas sektor dapat diantisipasi.
- d. Mengoptimalkan peran APIP sebagai pengawas dan pendamping
- e. Menyediakan anggaran yang memadai serta memperbaiki infrastruktur pendukung

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp 426.404.359.458 atau 55.88% dari pagu Belanja sebesar Rp. 763.109.540.479,72. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp. 397.224.938.347 atau 54.46% dari pagu belanja Rp. 729.273.767.938,72. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebesar Rp. 3.013.8831.169 atau 78.47% dari pagu belanja sebesar Rp. 3.840.317.915 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Anggaran TA. 2025

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	3.840.317.915	3.013.881.169	78.47%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	729.273.767.938.72	395.332.989.724	54.21%
Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja dg Baik	100%	29.995.454.626	28.057.488.565	93.5%
Total		763.109.540.479,72	426.404.359.458	55.88%

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA. 2025

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	71.40%	-
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	54.46%	45.54%
3	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja dg Baik	98.12%	93.5%	4.62%

Pada Tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah capaiannya tidak terpenuhi hal ini karena Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Belum Mengeluarkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset untuk Kabupaten Bengkalis, sehingga Target Indeks Pengelolaan Aset yang telah ditetapkan belum dapat hasilnya. pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 83,73 % dan tingkat efisiensi 16,63%. Dan sasaran meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja dengan baik capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 93.5% dengan tingkat efisiensi 20.88%.

E. Analisis Program /Kegiatan

Adapun program yang menunjang untuk indikator capaian kinerja indikator indeks pengelolaan asset adalah program pengelolaan barang milik daerah dengan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Program yang menunjang indikator indeks pengelolaan keuangan daerah adalah program pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan yaitu kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Program yang menunjang indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota denga kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini tercermin dari tercapainya beberapa indikator kinerja strategis seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah yang berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, serta capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berada pada kategori sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas serta peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, Indeks Pengelolaan Aset belum dapat dinilai karena hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri belum diterbitkan.

Beberapa langkah meningkatnya kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan.
2. Penetapan program dan kegiatan dengan penganggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis



H. Aready
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	B
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77
4	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Pengelolaan BMD daerah pada MCP Kopsurgah KPK	85%
		Nilai Area Penganggaran daerah pada MCP Kopsurgah KPK	85%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 403.029.141.576
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 5.999.668.534
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.762.384.233
	Jumlah	Rp 445.791.194.343

Bengkalis, Januari 2025

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos., MMP

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. AREADY
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750302 200212 1 004

Lampiran

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD KAB. BENGKALIS 2021-2026

TUGAS : Melaksanakan tugas penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

- FUNGSI**
1. Menyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 3. Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif, Kepatuhan Pengelolaan BMD Terhadap Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif dan Administrasi BMD yang Andal	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah.	Bidang Aset
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Nilai yang dikeluarkan oleh BAPPEDALITBANG Provinsi Riau.	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3	Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Evaluasi terhadap manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Dikeluarkan Inspektorat Daerah	Sekretariat

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BENGKALIS
Dr. H. AREADY, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda Tk. I
 NIP. 19750302 200212 1 004